

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan suatu hal yang sangat melekat dengan kegiatan sehari-hari manusia. Sadar atau tidak semua aktivitas, semua barang dan jasa yang digunakan sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pajak.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara
Realisasi Pendapatan Negara
(Milyar Rupiah)

	2021	Persentase
Penerimaan	Rp 1.733.042,80	
Penerimaan Perpajakan	Rp 1.375.832,70	79%
Pajak Dalam Negeri	Rp 1.324.660,00	76%
Pajak Perdagangan Internasional	Rp 51.172,70	3%
Penerimaan Bukan Pajak	Rp 357.210,10	21%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada tabel 1.1. yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistika (BPS), sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 1.375.832,70 miliar atau 79% dari total pendapatan negara bersumber dari pajak, dapat diartikan bahwa penyumbang terbesar dalam penerimaan dari sektor perpajakan. Menurut Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2007 pajak adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak dibedakan menjadi dua menurut instansi yang memungutnya yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dapat didefinisikan sebagai pajak yang

dipungut serta diolah oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM), dan lain-lain. Pajak daerah dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk membiayai daerah tersebut.

Tabel 1. 2.
Tabel Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah 27 September 2022

	Realisasi Penerimaan	Persentase
Pajak Daerah	9,504,314,585,377	98,43%
Pajak Kendaraan Bermotor	3,821,325,979,975	39,57%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2,143,030,407,000	22,19%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,595,459,102,004	16,52%
Pajak Air Permukaan	13,211,578,224	0,14%
Pajak Rokok	1,931,287,518,174	20,00%
Retribusi Daerah	3,511,460,384	0,04%
Retribusi Penyewaan tanah dan Bangunan	169,400,000	0.00%
Retribusi Penyewaan tanah dan Bangunan	2,084,433,487	0.02%
Retribusi Pemakaian Ruangan	1,257,626,897	0.01%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148,178,581,607	1.53%
Jumlah	9,656,004,627,368	

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Jawa Tengah

Berdasarkan data pada tabel 1.2. yang dipublikasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPPAD) Jawa Tengah, pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah memegang peranan penting dalam pendapatan asli daerah, pajak daerah berkontribusi sebesar Rp 9,504,314,585,377 atau sebesar 98,43% terhadap pendapatan asli daerah Jawa Tengah.

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak, pajak daerah yang memiliki pengaruh paling besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan tabel 1.2. PKB berkontribusi sebesar Rp 3.821.325.979.975 atau 39,57% terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah tersebut serta melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan berita yang diunggah oleh ddtc.co.id PKB di Provinsi Jawa Tengah belum maksimal dan perlu ditingkatkan, karena realisasi PKB pada tahun 2021 dinilai masih rendah yang hanya mencapai 96,92% dari target. Capaian penerimaan PKB tersebut masih di bawah rata-rata pendapatan daerah nasional yaitu 97,91%, salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan PKB adalah tunggakan PKB di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai angka Rp 932 miliar. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PKB.

Faktor pertama yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan PKB adalah jumlah kendaraan bermotor. menurut UU No.28 Tahun 2009 definisi kendaraan bermotor adalah:

“semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”

Jumlah kendaraan bermotor merupakan objek PKB, oleh karena itu banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang masyarakat miliki serta terdaftar di BPS Provinsi Jawa Tengah akan mempengaruhi jumlah penerimaan PKB.

Faktor selanjutnya yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan PKB adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Menurut BPS PDRB dapat didefinisikan sebagai:

“nilai dari suatu barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tetapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.”

PDRB dapat menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi pada suatu daerah dalam periode tertentu karena dari nilai PDRB dapat memberitahu bagaimana keadaan ekonomi wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu. PDRB per kapita adalah nilai dihasilkan dari nilai PDRB dibagi dengan keseluruhan masyarakat di daerah tersebut. PDRB per kapita dapat memberikan gambaran rata-rata pendapatan setiap penduduk di daerah tersebut. Menurut Zhang dan Cui dalam Mispian (2018) jika PDRB meningkat maka kemampuan dalam membayar pajak (*ability to pay*) juga akan meningkat.

Faktor ketiga yang menjadi pertimbangan adalah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan UU No.11 Tahun 2016, definisi umum tunggakan pajak merupakan:

“jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang

masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam UU tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan”.

Nominal tunggakan pajak seharusnya dapat menjadi bagian dari penerimaan pajak jika pemerintah setempat dapat mengatasi masalah mengenai tunggakan pajak yang ada.

Penelitian mengenai penerimaan pajak daerah khususnya PKB sudah banyak dilakukan sebelumnya dengan berbagai macam variabel. Terdapat beberapa penelitian yang dinilai relevan untuk dijadikan acuan. Beberapa diantaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2018), berjudul “Pengaruh Jumlah Dan Mutasi Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan PKB sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah kendaraan bermotor dan mutasi kendaraan bermotor. Subjek penelitian ini adalah WP PKB Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor dan mutasi masuk kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan PKB.

Penelitian kedua dilakukan oleh Apriliyanti *et. al.* (2021) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, inflasi, dan sistem pajak. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PKB Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa

jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan PDRB per kapita, inflasi, dan sistem pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Setiawan (2019), yang berjudul “Pengaruh Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak sedangkan variabel independen yang digunakan adalah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Subjek pada penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah tunggakan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Indah (2022) yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tarakan Kalimantan Utara”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah kendaraan bermotor, mutasi masuk kendaraan bermotor, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Subjek penelitian ini adalah WP PKB Kota Tarakan Kalimantan Utara. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor dan mutasi masuk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan tunggakan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kelima dilakukan oleh Wulandari (2018) yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor Di Kota Surakarta”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel independen yang digunakan adalah PDRB per kapita. Subjek penelitian BPS Kota Surakarta. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pemaparan mengenai kasus yang terjadi serta pemilihan variabel-variabel sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara variabel-variabel yang sudah penulis sebutkan sebelumnya yaitu jumlah kendaraan bermotor, PDRB dan tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan PKB di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2021. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah subjek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan subjek yang berbeda, yaitu laporan realisasi penerimaan PKB di Provinsi Jawa Tengah serta kombinasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih jarang ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah kendaraan bermotor roda 2 berpengaruh terhadap penerimaan PKB di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2021?
2. Apakah jumlah kendaraan bermotor roda 4 berpengaruh terhadap penerimaan PKB di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2021?
3. Apakah PDRB per kapita berpengaruh terhadap penerimaan PKB di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2022?
4. Apakah pertumbuhan tunggakan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan PKB di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor terbesar apa yang mempengaruhi penerimaan PKB di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah menemukan variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap penerimaan PKB di Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat praktik, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan masalah penerimaan PKB yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.
3. Manfaat kebijakan, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan perbaikan atas faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan PKB.

